Jurnal Imu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA) Volume 10 Nomor 1 (2026) 116-132

PERBANDINGAN SEKURITISASI ISU PENGUNGSI DI JERMAN DAN INGGRIS, PERIODE 2015 – 2021

Ayu Puspitasari[a], Khairunnisa Simbolon[b], Iwan Sulistyo[c]
[a b c] Universitas Lampung, Bandarlampung, Indonesia
E-mail: ayupuspitasariwsm@gmail.com

ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan membandingkan sekuritisasi isu pengungsi di Jerman dan Inggris pada periode 2015 – 2021. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan persepsi terhadap pengungsi di dua negara yang memiliki karakteristik serupa, yaitu sebagai negara anggota Uni Eropa, penganut paham liberal, memiliki komitmen regional dan internasional, dan pengalaman sejarah terhadap penerimaan pengungsi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan *the Most Similar System Design* (MSSD) untuk menjelaskan persoalan pengungsi secara detail dan membandingkan dua negara. Fokus penelitian ini ialah perbandingan sekuritisasi pengungsi di Jerman dan Inggris periode 2015 – 2021 menggunakan teori sekuritisasi dari Buzan, Wæver, and de Wilde. Hasil kajian ini menunjukan bahwa puncak arus pengungsi terjadi pada tahun 2015 yang diterima melalui skema *open door immigration policy* dari Uni Eropa, dimana pengungsi memberikan manfaat berupa tenaga kerja bagi Jerman dan pajak khusus bagi Inggris. Tetapi, manfaat tersebut tidak sebanding dengan beban biaya yang harus ditanggung dua negara dalam pemenuhan fasilitas publik bagi pengungsi. Hasil kajian ini juga menegaskan bahwa terjadi pergeseran kebijakan Jerman terhadap pengungsi dan menyebabkan Inggris melakukan referendum Brexit tahun 2016.
Kata Kunci: Jerman, Inggris, Pengungsi, Sekuritisasi, Studi Komparasi.

ABSTRACT
This study aims to explain and compare the securitization of the refugee issue in Germany and the United Kingdom (UK) during the 2015–2021 period. The research is motivated by differences in perceptions of refugees in two countries that share similar characteristics. This research uses a qualitative descriptive method with a case study approach and the Most Similar System Design (MSSD) to explain the refugee issue in detail and compare the two countries. This research focused on comparison of refugee securitization in Germany and the UK from 2015—2021 using the securitization theory of Buzan, Wæver, and de Wilde. The results show that refugee influx peaked in 2015, accepted through the European Union's open-door immigration policy. Initially, refugees provided benefits in the form of labor for Germany and specific taxes for the UK. However, these benefits were outweighed by the cost of providing public facilities. This study also confirms that there was a shift in German policy and that it caused the UK to hold the Brexit referendum in 2016.
Keywords:*, Germany, UK, Refugee, Securitization, Comparative Study.*

* Corresponding Author.
E-mail: ayupuspitasariwsm@gmail.com

PENDAHULUAN

Isu pengungsi telah menjadi persoalan penting yang diperdebatkan oleh negara-negara anggota Uni Eropa sejak Krisis Pengungsi tahun 2015 (Kok, 2021). Negara-negara Uni Eropa dipilih sebagai tujuan utama lantaran secara geografis sangat strategis dan mudah di akses melalui laut Mediterania, Turki, dan Yunani. Selain itu, negara anggota Uni Eropa telah meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, yang menunjukan komitmen terhadap perlindungan pengungsi sehingga dianggap mampu menjamin kehidupan yang lebih baik, khususnya di negara Jerman dan Inggris[1] (ABCNews, 2025; Weis, 1999). Konsekuensi dari daya tarik kedua negara tersebut terjadi ketika gelombang pengungsi masif di tahun 2015. Sebagai negara yang memiliki paham liberal dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), Jerman dan Inggris menghadapi tekanan internasional terhadap perlindungan pengungsi sehingga memunculkan dilema atas kendali terhadap pengungsi (Gibney & Hansen, 2003; Joppke, 1999). Fenomena ini menimbulkan perdebatan ketika jumlah pengungsi terus bertambah, tetapi penanganan dan kapasitas negara terbatas.

Tantangan dan tekanan tersebut menghadirkan tindakan yang berbeda dari dua negara yang memiliki karakteristik serupa dalam hal keanggotaan Uni Eropa, memiliki paham liberal, berkomitmen secara regional dan internasional, dan memiliki sejarah terhadap penerimaan pengungsi. Inggris cenderung mempersepsikan pengungsi sebagai ancaman bagi stabilitas keamanan dan budaya Inggris (Lindvall, 2016). Berbeda dengan Inggris, Jerman justru memandang pengungsi sebagai korban dan sumber tenaga kerja produktif bagi pergerakan ekonomi di Jerman. Persepsi ini mendorong Jerman untuk menerima pengungsi dalam jumlah yang signifikan mencapai 800.000 pengungsi di tahun 2015 dan bertambah 1,7 juta di tahun 2017 (Mustaq et al., 2021; Setiabudi, 2021; Trines, 2019).

Pembingkaian terhadap pengungsi yang dilakukan oleh dua negara terus berkembang melalui proses sekuritisasi sehingga mendorong tindakan luar biasa. Di Inggris tindakan itu berupa mengambil keputusan referendum *British Exit* (Brexit) di tahun 2016 dan resmi Brexit pada tahun 2021. Sebaliknya Jerman mengambil tindakan dengan menerima pengungsi dalam jumlah yang cukup besar dibandingkan dengan negara-negara anggota Uni Eropa lainnya. Dari permasalahan tersebut, muncul pertanyaan penelitian terkait "bagaimana perbandingan sekuritisasi pengungsi di Jerman dan Inggris periode 2015 – 2021?". Batas penelitian ini terletak pada periode waktu penelitian dari tahun 2015 – 2021. Rentang waktu ini dipilih sebab puncak pengungsi terjadi di tahun 2015 dan tahun 2021 dipilih sebagai batas akhir sebab pada saat itu Inggris bukan lagi bagian dari negara anggota Uni Eropa. Argumentasi dari penelitian ini didasari oleh teori sekuritisasi milik Buzan, Wæver, and de Wilde yang secara jelas mendefinisikan 7 aspek penting, yaitu aktor sekuritisasi, entitas yang terancam (*referent object*), entitas yang mengancam (*perceived threat*), pembingkaian, *speech act,* respon kebijakan, dan normalisasi/legitimasi suatu tindakan oleh publik (Buzan et al., 1998; Shah, 2024)

Kajian mengenai pengungsi di Jerman dan Inggris telah masif dikaji oleh sejumlah penelitian terdahulu. Sepuluh litelatur yang peneliti temukan membahas migrasi transnasional sebagai isu keamanan di Jerman dan Inggris selama Krisis Pengungsi tahun 2015 (Lindvall, 2016); perbandingan kebijakan imigrasi di tiga negara liberal, Amerika Serikat, Britania Raya, dan Jerman (Joppke, 1999); perkembangan tata kelola migran dan pencari suaka yang menghadapi krisis (Sahin-Mencutek et al., 2022); kebijakan imigrasi sebagai bagian dari sejarah sistem hukum, tujuan kebijakan, dan persepsi masyarakat di Kanada, Jerman, AS, dan Britania Raya yang memiliki tantangan imigrasi yang sama (Siddiqui, 2024); perbedaan sikap Britania Raya dan Jerman terhadap pengungsi (Kok, 2021); proses sekuritisasi migrasi di Britania Raya dan Jerman terjadi akibat sejarah dan politik masing-masing negara (Diez & Squire, 2008); isu pengungsi menjadi alasan Britania Raya keluar dari Uni Eropa (Brexit) (Nurtyandini & Santoso, 2022); sekuritisasi pengungsi oleh Britania Raya melalui kebijakan *hostile environment* (Perez,

[1] Pada menit ke 6.31/6.47 dalam YouTube *channel* ABC News, *link: https://youtu.be/eXYeDD5dUQQ?si=AcOY4E9AssukcwCn* salah satu pengungsi yang menyebrang melewati laut Mediterania berharap mendapatkan kehidupan yang lebih baik di UK (ABCNews, 2025).

2023); dan sekuritisasi oleh aktor politik Jerman demi agenda politik (Mustaq et al., 2021; Uranga, 2021).

Litelatur terdahulu umumnya menyoroti terkait kebijakan migrasi sebagai suatu isu keamanan dan terkait sekuritisasi pengungsi di masing-masing negara. Kajian perbandingan yang khusus membahas sekuritisasi pengungsi di dua negara, yaitu Jerman dan Inggris masih jarang dikaji. Peneliti bahkan menggunakan alat bantu *Publish or Perish* (PoP) dan VOSviewer untuk mencari kebaharuan dari kajian ini dan didapatkan bahwa isu migran, termasuk pengungsi telah menjadi persoalan penting yang mendapatkan perhatian akademik. Namun, masih terdapat kekosongan penelitian terkait studi komparatif (perbandingan) sekuritisasi isu pengungsi. Oleh karena itu, kajian ini akan secara detail menjelaskan persoalan pengungsi dan membandingkan sekuritisasi pengungsi di Jerman dan Inggris.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan *Most Similar System Design* (MSSD). Metode kualitatif deskriptif dipilih lantaran kajian ini bertujuan untuk mengeksplor proses dan fenomena yang berkaitan dengan sekuritisasi isu pengungsi di Jerman dan Inggris. Meskipun metode kualitatif menyajikan karakteristik umum yang esensial pagi peneliti, diperlukan pendekatan spesifik untuk memastikan penelitian tetap terstruktur dan berada dalam batas analitisnya (Creswell & Creswell, J, 2018). Pendekatan studi kasus diperlukan untuk membantu peneliti mengeksplorasi fenomena pengungsi di masing-masing unit analisis secara detail dan kronologis. Selain itu, pendekatan MSSD dapat membantu peneliti untuk membandingkan proses sekuritisasi pengungsi di dua negara yang memiliki karakteristik serupa. Kajian ini mengeksplor perbandingan sekuritisasi pengungsi di Jerman dan Inggris menggunakan alat analisis teori sekuritisasi Buzan, Wæver, and de Wilde. Dengan demikian, metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan MSSD sangat relevan digunakan untuk membahas fenomena spesifik secara mendalam.

Penelitian ini menggunakan sumber data utama dari berbagai dokumen dan audiovisual yang kredibel dan relevan. Data tersebut meliputi buku, artikel, laporan resmi, sumber berita, dataset internasional, dan audiovisual dari YouTube (Fox News, phoenix, dan UNHCR). Semua data tersebut dikumpulkan dan dipilih berdasarkan relevansi dengan kata kunci "sekuritisasi", "krisis pengungsi", "brexit", "Jerman", dan "Inggris". Data juga diperoleh dari Europen Union Agency for Asylum *(https://euaa.europa.eu)*, Government United Kingdom (www.gov.uk), Migration Watch UK (www.migrationwatchuk.org), International Organization for Migration *(www.iom.int),* dan UNHCR *(www.unhcr.org).* Dengan demikian, batasan data menjadi jelas dan tetap menjaga fokus konseptual serta metodologis. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik kondensasi dan divalidasi menggunakan triangulasi data. Teknik ini membantu menyederhanakan, mengorganisasikan, dan memfokuskan data mentah agar terstruktur dan mudah dipahami. Data kemudian dianalisis menggunakan alat teori sekuritisasi dan disajikan dalam bentuk tabel, gambar, dan narasi yang mudah dipahami oleh pembaca.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengungsi di Jerman dan Inggris

Salah satu destinasi utama para pengungsi di Kawasan Eropa adalah Jerman dan Inggris (Joppke, 1999). Kedua negara ini dipilih lantaran terikat pada Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, serta aturan regional *Comon Europan Asylum System* (CEAS). Secara umum kedua negara ini juga menganut paham yang sama, yaitu paham liberal yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan dianggap mampu menjamin perlindungan bagi pengungsi (EUAA, 2025; Joppke, 1999). Konsekuensi dari aturan tersebut membuat Jerman dan Inggris tidak luput dari permasalahan arus pengungsi yang juga sering disebut sebagai Krisis Pengungsi 2015. Mayoritas pengungsi datang dari negara non-Eropa sebagai akibat dari ketidakstabilan politik dan ekonomi di Timur Tengah (Yaseen et al., 2025). Sebagai upaya penanganan

permasalahan tersebut, Uni Eropa mengeluarkan suatu kebijakan yang wajib dijalankan oleh negara anggotanya, yaitu *open door immigration policy/open door policy*.

Penerimaan pengungsi di Jerman dan Inggris pada dasarnya dapat memberikan manfaat baik secara ekonomi maupun sosial. Di Jerman misalnya penerimaan pengungsi berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai 95 miliar euro (1,76 kuadraliun) di tahun 2016 – 2020 (Hentze & Kolev, 2016). Selain itu pengungsi yang terintegrasi dapat memaksimalkan kapasitas produksi sebesar 0,9% sehingga memperluas kemampuan produksi ekonomi Jerman (Hentze & Kolev, 2016). Demikian pula di Inggris, dimana terdapat sumber pemasukan lain bagi negara melalui pajak khusus yang dibayarkan oleh para pengungsi. Tahun 2016/2017 rata-rata penerimaan pendapatan dari migran di Inggris mencapai £2,300 atau setara dengan Rp.52 juta (Oxford Economics, 2018). Alasan tersebut mendorong kedua negara, khususnya Jerman menerima pengungsi dalam jumlah yang signifikan sebagai akibat dari menurunnya angka kelahiran yang berkontribusi pada kurangnya tenaga kerja. Berikut jumlah pengungsi yang diterima Jerman dan Inggris selama rentang waktu 2015 – 2021.

Gambar 1. Jumlah pengungsi yang mendapatkan status resmi

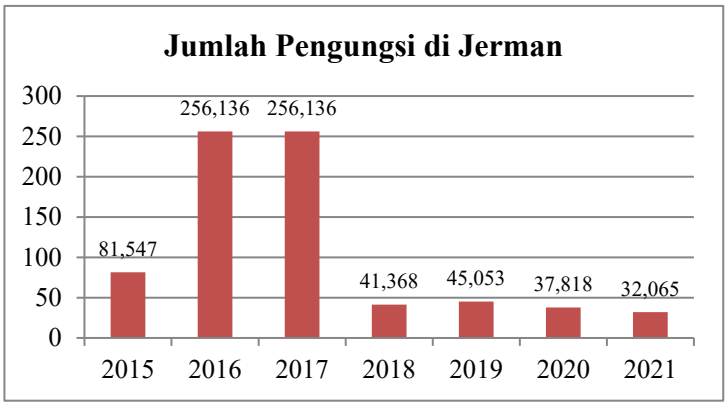

Sumber: AIDA, 2018; BMI, 2021; Hoffmeyer-Zlotnik, 2021; Kalkmann, 2015, 2016, 2017; Kalkmann & Hesari, 2019; Riemer et al., 2024; Stiller & Hoffmeyer-Zlotnik, 2022; Zusammenfassung, 2021, diolah oleh peneliti menggunakan Excel, 2025.

Gambar 2. Jumlah pengungsi di Inggris yang diakui secara resmi tahun 2015 – 2021

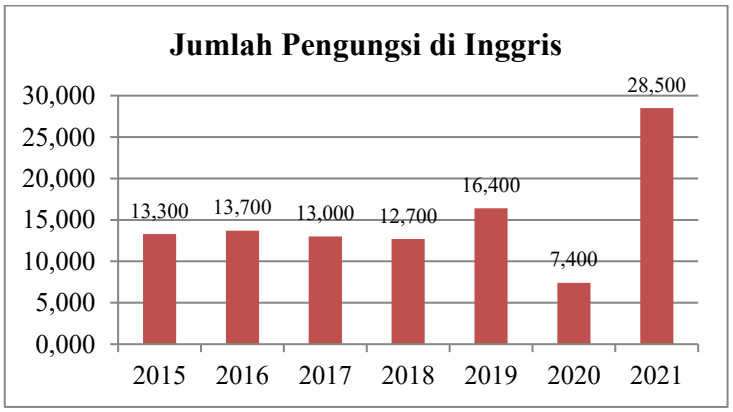

Sumber: Kirk-wade & Barton, 2025, diolah oleh pengungsi menggunakan Excel, 2025.

Pengungsi yang terus berdatangan tanpa dibarengi dengan kapasitas negara dalam penanganan pengungsi dapat menimbulkan tantangan baru. Misalnya, Jerman dan Inggris perlu menyediakan fasilitas publik yang layak, seperti fasilitas kesehatan, perumahan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan bagi pengungsi. Penyediaan fasilitas tersebut, nyatanya, tidak sebanding dengan manfaat yang diterima masing-masing negara melalui kontribusi PDB dan pajak khusus (Alkousaa, 2025; Kinkartz, 2023; Warmbein et al., 2023). Jerman bahkan perlu mengeluarkan sebesar 10 miliar USD di sektor ekonomi yang dianggap memberatkan APBN Jerman (Yeni,

2019). Selain itu, pengungsi secara resmi berkontribusi terhadap peningkatan kriminalitas, seperti beberapa pengungsi di Inggris yang melakukan perampokan, pembunuhan, pencabulan, dan kekerasan terhadap anak di bawah umur (Hamilton et al., 1997; Nurtyandini & Santoso, 2022; Putra et al., 2016). Fenomena ini mendorong Jerman dan Inggris menerapkan kebijakan pembatasan, seperti *masterplan migration* di Jerman dan Brexit (*British Exit*) di Inggris.

B. Proses Sekuritisasi Pengungsi di Jerman

Pada awal krisis pengungsi tahun 2015, pembingkaian pengungsi di Jerman cenderung dilihat dari sisi kemanusiaan. Kanselir Jerman, Angela Merkel mengartikulasikan pengungsi sebagai suatu 'tragedi'. Merkel menempatkan pengungsi sebagai 'korban' atau *"weitere Opfer im Mittelmeer"* yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Pandangan ini menempatkan Jerman pada upaya pencegahan kematian pengungsi secara tragis di Laut Mediterania karena mereka layak mendapatkan perlindungan. Menurutnya, membiarkan kematian tersebut tidak sesuai dengan nilai dan norma yang dijunjung oleh Jerman dan negara-negara anggota Uni Eropa lainnya (AlJazeera, 2015; phoenix, 2015)[2].

Merkel lebih sering menggunakan istilah *"human being", "dignity",* dan *"each person one person"* serta menghindari istilah *"crisis"* dan *"masses or crowded"* (Gómez, 2019). Keterbukaan Jerman terhadap pengungsi juga tercerminkan melalui pendapat Özugus, seorang politisi Jerman dari Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) (dalam bahasa Indonesia Partai Sosial Demokrat). Özugus mengkritik kecenderungan sebagian orang Jerman yang melabeli pengungsi hanya sebagai *"pengungsi ekonomi"* atau*"wirtschaftsflüchtling"* tanpa mengetahui penderitaan dan kesulitan yang dialaminya (Lindvall, 2016). Bahkan, Özugus menghimbau agar Jerman menciptakan kebijakan migrasi yang adil dan manusiawi (*legale Zugangsmöglichkeiten*) (Özoguz, 2015).

Pembingkaian serupa juga dilakukan oleh PRO ASYL dan Terre des homes. Organisasi-organisasi ini cenderung menggunakan istilah-istilah positif, seperti *"standing up for refugee protection", "refugee rights",* and *"rights of children",* (PRO ASYL, n.d.; Terre des Hommes, 2024). Selain itu, media massa Die Tageszeitung mencoba melihat isu pengungsi dari sudut pandang pengungsinya sendiri guna memperlihatkan sisi perjuangan mereka kepada publik (Abdi, 2025). Jerman juga membantu integrasi pengungsi di pasar tenaga kerja melalui Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) atau *"German Chamber of Commerce and Industry"* yang memberikan fasilitas untuk berjejaring dengan 2.000 perusahaan di Jerman (Dowling, 2019). Perusahaan atau sektor swasta yang bekerja sama tersebut berkomitmen untuk mendukung integrasi pengungsi sebagai bentuk tanggung jawab sosial.

Persepsi positif tersebut kemudian menciptakan kebijakan *welcoming culture/welcome refugee* di tahun 2015 dan menerapkan kebijakan *open door policy* dari Uni Eropa (Niu et al., 2023). Kebijakan ini sebagai bentuk keterbukaan Jerman terhadap pengungsi dan untuk mengatasi krisis pengungsi di Uni Eropa (Haliza & Pujiyono, 2019; Niu et al., 2023). Namun, di tahun 2016 dan 2017 terjadi lonjakan besar gelombang pengungsi (Steffy, 2023) yang menghadirkan tantangan nyata khususnya dalam sektor ekonomi dan sosial. Merkel kemudian menggunakan dua istilah untuk menyebut pengungsi, yaitu 'pengungsi legal' dan 'pengungsi ilegal' (Gómez, 2019, p. 55). Dalam konteks ini, pengungsi ilegal cenderung dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas fiskal negara (Gómez, 2019).

Narasi sekuritisasi kemudian disebarluaskan oleh partai sayap kanan (konservatif), seperti AfD, CSU, dan gerakan anti-Islam PEGIDA. Ketiga partai ini memiliki pandangan ideologis yang rasis, *xenophobic*, anti-pengungsi, dan *Islamophobic* (Dasep, 2024; Mustaq et al., 2021; Uranga, 2021). Partai AfD memandang pengungsi sebagai *"foreign army"* yang datang untuk menyerbu Eropa dan menghancurkan identitas budaya Jerman. Selain itu, pembingkaian melalui media poster marak dilakukan oleh AfD selama masa kampanye pemilu tahun 2018. Istilah

[2] Dimuai pada detik ke-36 "kami akan melakukan segala upaya untuk mencegah agar tidak ada lagi korban jiwa di Laut Tengah, tepat di depan pintu rumah kita, yang meninggal dengan cara paling menyiksa. Hal itu tidak sejalan dengan nilai-nilai yang kita junjung tinggi di rumah kita sendiri, kita harus meningkatkan upaya kita" (phoenix, 2015).

"Islamferi" atau *"bebas Islam"* dalam poster pada gambar 3 memiliki makna bahwa Islam yang dibawa oleh para pengungsi atau imigran tidak sesuai dengan budaya Jerman dan dapat mengancam identitas Jerman (Ataç, 2019; Uranga, 2021).

Gambar 3. Poster kampanye AfD tahun 2018

Sumber: Ataç, 2019.

Gambar 4. Poster kampanye AfD yang menggunakan narasi anti-Islam

Sumber: Ataç, 2019.

Retorika *'mengerikan'* juga datang dari partai CSU dan gerakan PEGIDA yang memvisualisasikan pengungsi sebagai ancaman eksistensial. Pimpinan CSU bernama Horst Seehofer mengaitkan pengungsi dengan kelompok terorisme "*Islamist terrorism has arrived in Germany"* (Mustaq et al., 2021). Kemudian, istilah *"clap-idiots"* diungkapkan Lutz Bachmann yakni pimpinan PEGIDA melalui laman *X* yang menilai masyarakat Jerman tidak memahami konsekuensi kedatangan pengungsi (Harding, 2016; Mustaq et al., 2021).

Penerimaan publik terhadap narasi tersebut berhasil mendorong Pemerintah Jerman menciptakan kebijakan ketat. Horst Seehofer seorang Menteri Dalam Negeri Jerman mengeluarkan kebijakan *Masterplan Migration* di tahun 2018. Kebijakan ini bertujuan untuk menertibkan (*orden*), mengendalikan (*steuern*), dan membatasi (*begrenzen*) pengungsi yang masuk ke Jerman dengan hanya memberikan kuota sebanyak 180.00 hingga 220.00 orang per tahun (Bundesministerium des Innern, 2018). Kebijakan ini dimulai dengan mendirikan pusat AnkER (*Ankunft, Entscheidung, Rückführung*), yang digunakan untuk mempercepat proses keputusan suaka (Bundesministerium des Innern, 2018; Mouzourakis et al., 2019). Melalui kebijakan ini, Jerman dapat menolak pemohon suaka yang telah mengajukan suaka di negara Uni Eropa lainnya.

Tekanan juga datang dari partai CSU dan *Christlich Demokratische Union* (CDU) yang menuntut pembatasan migrasi secara ketat *"a strict limitation of migration is urgently needed"* (CDU, 2025). Merespon hal ini, Jerman memperkuat repatriasi pengungsi, bekerja sama dengan Uni Eropa dan Turki di tahun 2016 (European Parlement, 2025; MEMO, 2015), dan menutup jalur penyelundupan utama di wilayah Mediterania dan Balkan (CDU, 2025; Liu & Yin, 2021). Kemudian di tahun yang sama, Jerman mengeluarkan *Asylum Package I & II* yang bertujuan untuk mempercepat proses suaka, mempermudah deportasi bagi kalangan tertentu, dan

mengganti bantuan tunai menjadi barang serta mengurangi tunjangan dari €145 menjadi €135 (Flüchtlingsrat Mecklenburg-Vorpommern e.V., 2016). Tindakan ini dilakukan untuk mengurangi daya tarik Jerman di mata pengungsi.

Kemudian *Bundesministerium des Innern* (BMI) atau dalam bahasa Indonesia Kementerian Dalam Negeri Federal mengeluarkan Undang-Undang Pemulangan Tertib (*Geordnete-Rückkehr-Gesetz*) di tahun 2019. Kebijakan ini bertujuan untuk menegakkan hukum bagi pengungsi yang kewajiban suakanya ditolak oleh Pemerintah Jerman (Bundesministerium des Innern, 2019). Pengungsi tersebut kemudian ditahan di penjara biasa, dengan kata lain pengungsi/migran yang tidak melakukan kejahatan ditempatkan bersama tahanan kriminal. Pemerintah Jerman memperluas penahanan terhadap migran dan mengkriminalisasi pengungsi/migran dengan menggabungkan di tempat yang sama dengan tahanan kriminal (Bundesministerium des Innern, 2019; Deutsches Institut für Menschenrechte, 2019; PRO ASYL, 2019).

Selain itu BMI mewajibkan migran memiliki paspor atau dokumen perjalanan, dan jika tidak memiliki identitas maka akan di cap sebagai *duldung light* (Bundesministerium des Innern, 2019). Label ini dapat mempersulit pengungsi khususnya dalam mencari pekerjaan, mendapatkan akses pendidikan, tempat tinggal, bahkan kesempatan terintegrasi dengan budaya dan sistem Jerman. Dengan demikian pengungsi tidak lagi dipandang sebagai korban yang membutuhkan bantuan, melainkan objek yang harus dikelola dan dikeluarkan karena dapat mengancam keamanan nasional.

Adanya tindakan dan kebijakan tersebut merepresentasikan bahwa publik menerima narasi yang telah dikonstruksikan oleh aktor sekuritisasi. Dukungan publik secara konkret terlihat dari 51% penduduk Jerman yang menganggap pengungsi sebagai ancaman eksistensial terhadap identitas, ekonomi, dan stabilitas keamanan Jerman (Decarli, 2022). Bahkan, publik melegitimasi tindakan kekerasan yang terjadi tahun 2016 dimana setiap harinya terdapat 10 serangan terhadap pengungsi dan migran. Ada sekitar 3.533 serangan terhadap tempat penampungan pengungsi atau kamp pengungsi, sebanyak 2.545 serangan terhadap individu migran, dan lebih dari 217 kasus serangan terhadap relawan dan organisasi yang bekerja untuk pengungsi (BBC, 2017; FRA, 2016; Mustaq et al., 2021; Strickland, 2016). Partai AfD yang fokus terhadap sekuritisasi isu pengungsi juga mendapat dukungan yang signifikan. AfD mendapatkan 4 juta suara di tahun 2017 sehingga menjadikan AfD sebagai partai ketiga terbesar di Bundestag (Uranga, 2021).

Meski demikian, masih terdapat masyarakat Jerman yang menolak kebijakan ketat terhadap imigran atas dasar kemanusiaan. Seorang aktivis lokal bernama Feger mendukung pengungsi dengan menciptakan *international café* di Kota Dresden. Awal mula kafe ini diciptakan adalah karena Feger tidak pernah melihat para pengungsi berkumpul di tempat umum. Feger kemudian berpikir untuk menciptakan tempat yang ramah dan aman bagi pengungsi untuk berkumpul. *International café* juga digunakan sebagai tempat untuk belajar bahasa, budaya, berdiskusi, dan bermain bersama (Kushner, 2017). Dengan demikian, merujuk pada teori sekuritisasi Buzan, yang menjadi *referent object* adalah stabilitas keamanan dan identitas budaya Jerman, sedangkan kelompok yang mengancam (*perceived threat*) yaitu pengungsi yang datang ke Jerman.

C. Proses Sekuritisasi Pengungsi di Inggris

Persoalan pengungsi telah menjadi prioritas Pemerintah Inggris sejak awal tahun 2000-an. Pengungsi yang datang ke Inggris cenderung dipersepsikan sebagai ancaman bagi budaya dan stabilitas keamanan Inggris. Perdana Menteri Britania Raya bernama David Cameron membingkai migran sebagai permasalahan yang dapat berdampak bagi seluruh negara anggota Uni Eropa (Cameron, 2015a). Cameron menggunakan narasi-narasi seperti *"refugee crisis", "the challenges of refugee",* dan *"swarm of people"* sebagai bagian dari proses sekuritisasi terhadap pengungsi (Cameron, 2015a, 2015b; Dinnen, 2015; ITV News, 2015). Narasi serupa juga digunakan oleh politisi sayap kanan yakni Suella Baraverman yang mengatakan bahwa pengungsi adalah bagian dari krisis migrasi global, *"the small boats problem is part of a larger global migration crisis", "unprecedented pressures level from greater numbers of people leaving the developing world",* dan *"the problem will be worse tomorrow"* (Braverman, 2023).

Media massa Inggris turut berkontribusi terhadap pembingkaian pengungsi dengan cara menyebarluaskan berita pengungsi dengan streotipe negatif. Salah satu media massa Inggris yang paling terkenal adalah The Guardian.[3] Media ini cenderung membingkai pengungsi dan pemohon suaka (RAS) sebagai ancaman terhadap keamanan nasional dan budaya (Kelsall, 2015; Lindvall, 2016). Persepsi ini berkembang lantaran pengungsi dianggap sebagai kelompok kolektif homogen (*collectivization-othering*) yang menyebabkan permasalahan hukum dan keamanan sehingga perlu dikendalikan (Kelsall, 2015). Pembingkaian tersebut berdampak pada cara pandang masyarakat Inggris yang memandang pengungsi sebagai objek yang harus diwaspadai.

Menurut kajian Radu (2018), stigmatisasi paling negatif terhadap pengungsi adalah penggunaan istilah *'jungle'* pada berita yang ditulis oleh Alice Rowsome (2018). Penggunaan kata *"jungle"* pada kalimat *"following the demolition of the 'jungle' in October 2016 and…"* (Rowsome, 2018) menggambarkan pengungsi sebagai sosok yang 'liar' dan 'berbahaya' lantaran hidup di kamp yang disebut *"jungle"*. Hal tersebut menciptakan diskursus anti-migran di kalangan penduduk Inggris dan tuntutan masyarakat terhadap kebijakan migran untuk melindungi kepentingan nasional Inggris. Selain itu, kelompok resmi *Vote Leave* atau pendukung Brexit mempersepsikan pengungsi sebagai penjahat berbahaya dan dianggap sebagai ancaman, *'Britain is under attack from migrants, particulary asylum seekers and refugees'* (Cooper & Blumell, 2021). Kelompok ini juga secara khusus memisahkan pengungsi dan masyarakat Inggris dengan menggunakan kata *"us"* dan *"them"* sebagai penekanan (Cooper & Blumell, 2021; Radu, 2018; Stewart & Mason, 2016; Virdee & Mcgeever, 2018).

Argumen sekuritisasi ini diperkuat dengan temuan lembaga *Think Tank* Migration Watch UK. Lembaga ini melihat kehadiran pengungsi sebagai katalis munculnya permasalahan keamanan lain akibat adanya 'celah' bagi masuknya budaya dan kelompok terorisme. Sebagai contoh, data yang disajikan Migration Watch UK menunjukan bahwa mayoritas pengungsi yang datang ke Inggris berasal dari negara yang sama dengan kelompok terorisme. Data tersebut menunjukan bahwa telah terjadi peningkatan sebesar 667% insiden antisemitisme (2013 – 2023) dan terjadi peningkatan kehadiran *Foreign National Offenders* (FNO) sebanyak 12% di penjara Inggris (Migration Watch UK, 2024).

Persepsi tersebut menggerakkan Inggris untuk secara tegas mengambil tindakan penanganan dan pembatasan pengungsi. Inggris juga secara tegas menolak terlibat dalam skema redistribusi[4] pengungsi dalam aturan *Dublin Regulation*[5]. Inggris justru menawarkan kerja sama dengan negara anggota Uni Eropa lainnya sebelum terjadinya Brexit untuk bekerja sama mengatasi persoalan pengungsi. Hal ini ditunjukkan melalui pidato Cameron dalam rapat bulanan Parlemen Eropa.

> *"At last year's General Assembly we undertook to do far more to resolve the challenges of refugee and migration flows. We agreed to develop global compacts to address the causes and the consequences of the mass movements of people we see today. This was an important step to elevate significantly global response and enable us collectively to tackle this challenge"* (Cameron, 2015a).

Inggris kemudian melakukan kerja sama dan mengeluarkan kebijakan terkait pembatasan pengungsi. Negara ini bahkan telah memiliki kebijakan *hostile environment* yang dikeluarkan oleh Theresa May sejak tahun 2012. Kebijakan ini bertujuan untuk mempersulit hidup imigran yang tidak memiliki dokumen resmi sehingga memaksa para imigran untuk pergi dengan sendirinya (Global Justice Now, 2018; Griffiths & Yeo, 2025; Pierce et al., 2025). Ketidaknyamanan yang diciptakan oleh Pemerintah Inggris dilakukan dengan membatasi

[3] The Guardian dipilih sebagai sampel dikarenakan dianggap memiliki berita yang objektif dan merupakan media dengan jumlah pembaca terbanyak di media cetak maupun situs digital, yaitu mencapai 22.904 orang pada tahun 2016 (Radu, 2018).

[4] Terdapat pada pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur penyatuan keluarga sehingga memungkinkan Inggris terlibat dalam tanggung jawab pengungsi dari negara lain (negara perbatasan) (European Parlement, 2020).

[5] Dublin regulation diterapkan pada tahun 2003 yang bertujuan untuk mengatur pengelolaan pencari suaka di negara pertama atau negara perbatasan untuk masuk Uni Eropa (UNHCR, 2008).

kebutuhan dasar para imigran, seperti akses terhadap kesehatan, tempat tinggal, pekerjaan, dan pendidikan (Pierce et al., 2025). Dampak lainnya yang dirasakan adalah akses kesehatan pada ibu hamil yang dibatasi, termasuk perawatan selama kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan. Kebijakan ini bertentangan dengan kebijakan nasional Inggris, yaitu *National Health Security* (NHS) untuk memberikan akses kesehatan bagi semua orang dengan adil.

Upaya lain yang dilakukan Cameron adalah mengkriminalisasi pekerja migran dan melakukan kerja sama perbatasan dengan Prancis. Kriminalisasi pekerja migran tertuang dalam kebijakan *Immigration Act* 2016 pasal 34 dan 35 bagian 2, yang menjelaskan pasal-pasal pidana baru terkait pekerja ilegal (Cameron, 2015b). Selanjutnya kerja sama dengan Prancis dilakukan dengan memperketat pengawasan perbatasan. Pemerintah Inggris mendanai Prancis sebesar £45.96 juta melalui *join declaration* untuk meningkatkan keamanan di perbatasan Kota Calais (Gower, 2025). Di tahun 2017, anggaran untuk memperkuat perbatasan dan pengawasan di dua negara mencapai £36 juta dengan dana tambahan sebesar £2.5 juta untuk mendukung rencana aksi bersama dan penguatan Gendarmerie[6] pada tahun 2019 (Gower, 2025).

Penggunaan militer juga dilakukan oleh Pemerintah Inggris dengan menunjuk komandan Dan O'Mahoney sebagai *Clandestine Channel Threat Commander* untuk melindungi kedaulatan Inggris. Inggris juga mendirikan *Border Security Commander* sebagai unit yang bertugas untuk menanggulangi kejahatan terorganisir imigran dan mengurangi migran, khususnya pengungsi (UK Parliament, n.d.). Bahkan, Kementerian Dalam Negeri Inggris mempertimbangkan untuk menerapkan *"blockade tactics"* di *Tunnel Channal* yang bertujuan menghadang perahu yang masuk ke Inggris (Perez, 2023). Selain itu, Cameron mengambil tindakan untuk melakukan referendum Brexit di tahun 2016 agar dapat mengatur kebijakan imigrasi secara independen. Hal ini dilakukan sebagai akibat dari penerapan kebijakan Uni Eropa *open door policy* yang mendatangkan migran dalam jumlah besar.

Tindakan dan kebijakan tersebut mencerminkan penerimaan audiens terhadap narasi ancaman pengungsi terhadap Inggris. Penerimaan publik terhadap narasi sekuritisasi dapat dibuktikan dengan adanya pendapat publik terkait pengurangan jumlah pengungsi di Inggris (gambar 5). Data ini diambil dari *The Migration Observatory* tahun 2015 – 2021, tentang pendapat apakah pengungsi perlu ditambah banyak, ditambah sedikit, dikurangi dalam jumlah yang banyak, dan dikurangi dalam jumlah yang sedikit. Mayoritas publik memilih untuk mengurangi migran dalam jumlah yang banyak dan sedikit. Kemudian, data dari The Guardian menunjukkan tingkat kekhawatiran masyarakat Inggris yang tinggi di tahun 2015 terhadap isu migran dipandang sebagai isu prioritas. Di tahun 2021, menjadi tahun ketika Inggris resmi keluar dari Uni Eropa (Brexit) sehingga menurunkan kekhawatiran masyarakat Inggris terhadap arus pengungsi yang tidak terkendali (Goodier, 2025; Venkataramakrishnan, 2025).

Gambar 5. Pendapat publik terkait pengurangan jumlah pengungsi tahun 2015 – 2021[7]

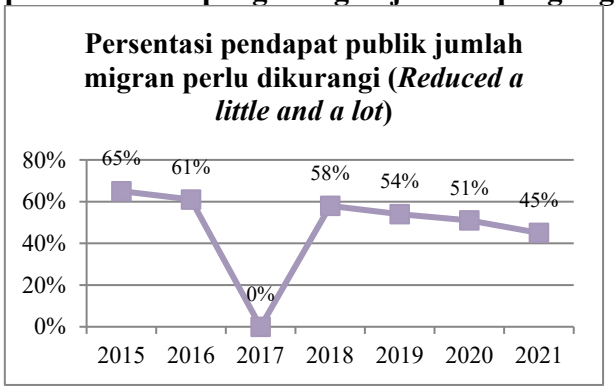

Sumber: Richards et al., 2025.

[6] Gendarmerie adalah pasukan militer Prancis yang bertugas menjalankan fungsi kepolisian, seperti bertugas menegakkan hukum, keselamatan publik, ketertiban umum, intelijen, dan bertugas di pedesaan atau perbatasan (Eurogendfor, 2025; NATO, n.d.).

[7] Data tahun 2017 tidak ditemukan.

Gambar 6. Fluktuasi kekhawatiran publik Inggris terhadap Isu Imigrasi tahun 1990 – 2025

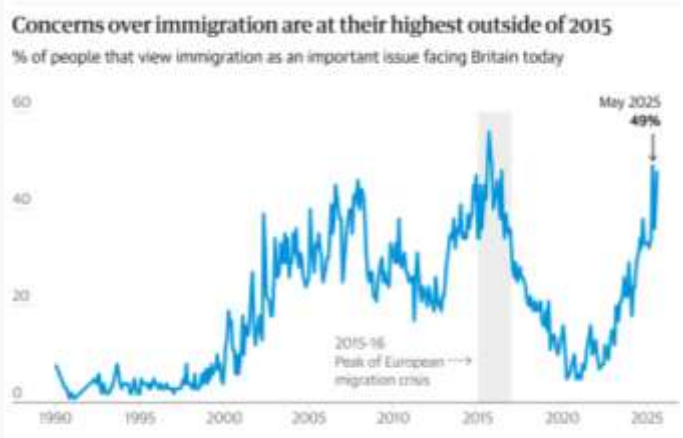

Sumber: Goodier, 2025; Venkataramakrishnan, 2025.

Dukungan publik terhadap narasi sekuritisasi juga dapat dibuktikan dengan mayoritas masyarakat Inggris yang memilih melakukan referendum Brexit di tahun 2016. Dari sekitar 30 juta pemilih, sebanyak 51,9% masyarakat memilih Brexit dan 48,1% memilih tetap bersama Uni Eropa (Nurtyandini & Santoso, 2022). Hal ini sudah menunjukkan bahwa publik melegitimasi tindakan luar biasa, seperti Brexit, demi menciptakan kebijakan yang independen terhadap pengungsi. Jika merujuk pada teori Buzan, hal ini menandai keberhasilan pembingkaian dan tindakan tutur (*speech act*) dari aktor sekuritisasi.

D. Analisis Perbandingan Sekuritisasi Pengungsi di Jerman dan Inggris

Aktor memainkan peranan penting dalam mengonstruksi suatu isu guna mengakomodasi kepentingan strategisnya. Misalnya, aktor dapat mengonstruksi isu pengungsi sebagai suatu ancaman atau isu keamanan guna melegitimasi kebijakan keamanan yang ketat. Pihak yang melakukan konstruksi ini biasa disebut sebagai aktor sekuritisasi. Namun perlu diperhatikan bahwa terdapat proses yang berulang ketika hendak menjadikan isu pengungsi sebagai suatu isu keamanan. Oleh karena itu, analisis ini disajikan menggunakan dasar argumentasi yang berasal dari teori sekuritisasi Buzan, Waever, dan Wilde.

Peneliti melihat terdapat dua aktor kunci dalam proses pembingkaian pengungsi di Jerman, yaitu aktor desekuritisasi dan aktor sekuritisasi. Dua aktor ini muncul lantaran terdapat dua kelompok berbeda yang membingkai pengungsi dari segi kemanusiaan dan dari segi ancaman bagi identitas Jerman. Hal ini juga sebagai akibat dari adanya kebijakan *welcome refugee* di awal krisis dan sebagai pemenuhan kebutuhan Jerman akan tenaga kerja. Aktor desekuritisasi meliputi Angela Merkel, Özugus dari partai *Sozialdemokratische Partei Deutschlands* (SPD), PRO ASYL, *die tageszeitung***,** dan Terre des homes; dan aktor sekuritisasi meliputi Angela Merkel (2017 – 2021), CSU, AfD, dan gerakan anti-islam PEGIDA. Berbeda dengan Jerman, aktor sekuritisasi pengungsi di Inggris justru lebih luas karena sejak awal telah membingkai pengungsi sebagai ancaman bagi budaya dan stabilitas keamanan. Aktor tersebut meliputi David Cameron, Suella Braverman, Theresa May, media The Guardian, lembaga *think tank* Migration Watch UK, dan masyarakat sipil *Vote Leave.*

Aktor-aktor tersebut membingkai pengungsi sebagai ancaman terhadap identitas budaya, stabilitas keamanan negara, dan bahkan bagi stabilitas fiskal negara. Hal ini memicu tindakan tutur kata yang mengatakan bahwa isu pengungsi harus segera ditangani, karena jika tidak maka akan menjadi tidak terkendali; *"the small boats problem is part of a larger global migration crisis", "unprecedented pressures level from greater numbers of people leaving the developing world",* dan *"the problem will be worse tomorrow"* (Braverman, 2023). Bahkan Pemerintah Inggris secara spesifik mengatakan bahwa Inggris telah diserang oleh migran, pemohon suaka, dan pengungsi; *'Britain is under attack from migrants, particulary asylum seekers and refugees'* (Cooper & Blumell, 2021). Begitupun dengan Jerman yang mulai menggunakan narasi sekuritisasi, misalnya pimpinan CSU, Horst Seehofer mengaitkan pengungsi dengan kelompok

terorisme "*Islamist terrorism has arrived in Germany"* (Mustaq et al., 2021). Partai AfD juga menggunakan istilah *"islamferi"* dan *"foreign army"* pada poster kampanye sebagai bentuk penolakan budaya Islam dan kekhawatiran akan potensi mengancam identitas budaya Jerman. Sekuritisasi pengungsi yang dilakukan oleh partai Jerman cenderung mengarah ke Pengungsi yang beragama Islam dengan penggunaan poster yang berbasis anti-Islam.

Pembingkaian dan tindakan tutur kata yang berhasil mengubah persepsi publik terhadap pengungsi telah melegitimasi kebijakan pemerintah. Kebijakan tersebut diantaranya menciptakan lingkungan yang tidak ramah pengungsi (*hostile environment*), kriminalisasi pengungsi (*Immigration Act 2016*), memberikan bantuan barang untuk mengurangi minat pengungsi ke Jerman bahkan mempercepat deportasi (*Asylum Package I* dan *II,* 2016), menerapkan kebijakan *masterplan migration* tahun 2018 di Jerman, membentuk Undang-Undang Pemulangan Tertib (*Geordnete-Rückkehr-Gesetz*) di tahun 2019, bahkan Inggris melakukan referendum Brexit di tahun 2016 demi menciptakan kebijakan migran yang independen. Brexit menjadi tanda dukungan terhadap kebijakan yang ketat bagi pengungsi.

Sekuritisasi pengungsi juga berdampak pada legitimasi tindakan-tindakan yang menggunakan kekerasan, sepeti pemukulan, pelecehan, pembakaran, pengeboman, dan bahkan terciptanya kota tidak ramah terhadap migran, termasuk pengungsi. Di Jerman, legitimasi tersebut ditunjukkan melalui angka dukungan terhadap partai AfD yang meningkat sebanyak 4 juta suara dan menjadikan AfD sebagai partai terbesar di Bundestag (Mustaq et al., 2021; Uranga, 2021). Legitimasi tersebut juga berhasil mengubah arah kebijakan Jerman dari keterbukaan terhadap pengungsi (*welcome refugee*) dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan menjadi kebijakan yang lebih ketat. Selain itu, kebijakan pengetatan perbatasan, penundaan reunifikasi keluarga, deportasi, dan kategorisasi pengungsi menjadi hal yang perlu dilakukan sebagai respons akibat krisis yang terjadi. Hal ini menyebabkan standar perlindungan HAM di Jerman menjadi lebih fleksibel demi kepentingan keamanan nasional Jerman. Sekuritisasi pengungsi juga telah menciptakan polarisasi dalam masyarakat Jerman. Di satu sisi penduduk Jerman mendukung pembatasan pengungsi, tetapi di sisi lain mendukung penerimaan pengungsi atas dasar HAM.

Kondisi serupa juga terjadi di Inggris dengan dampak sekuritisasi yang lebih luas hingga menciptakan kebijakan yang tidak ramah terhadap pengungsi (*hostile environment*). Persepsi dan kebijakan yang terbentuk di Inggris kemudian menciptakan keamanan berlapis yang berdampak pada pengelolaan pengungsi. Pengungsi yang masuk ke Inggris harus melalui proses rumit dan sulit bahkan ketika sudah mendapatkan status tidak menjamin kehidupan yang aman dan nyaman. Ada banyak fasilitas publik yang dibatasi oleh Pemerintah Inggris untuk pengungsi. Adapun, tantangan yang mengancam nyawa untuk dapat mencapai daratan Inggris, belum lagi penjagaan ketat jika pengungsi melalui Kota Calais, Prancis.

KESIMPULAN

Kedua negara yang memiliki karakteristik serupa pada akhirnya mempersepsikan pengungsi sebagai ancaman bagi identitas, budaya, dan kedaulatan negara. Kondisi ini berbanding terbalik dengan kondisi awal krisis pengungsi tahun 2015. Jerman awalnya menyambut pengungsi dengan menciptakan kebijakan *welcome refugee*, yang dilatarbelakangi oleh permasalahan demografi. Permasalahan ini mendukung penerimaan pengungsi sebagai tenaga kerja untuk kepentingan ekonomi Jerman. Narasi-narasi positif juga dikeluarkan oleh aktor negara Angela Merkel dan Özugus, NGO, seperti PRO ASYL dan Terre des homes, serta media Die Tageszeitung. Hal ini tentu berbeda dengan Inggris yang sejak awal secara tegas menolak redistribusi pengungsi dan *open door policy.* Inggris bahkan telah menciptakan kebijakan *hostile environment* dan memutuskan untuk melakukan referendum Brexit di tahun 2016. Di tahun 2021, Inggris secara resmi memiliki kebebasan untuk menciptakan kebijakan migran secara independen. Di sisi lain, Jerman mulai memandang pengungsi sebagai ancaman sejak 2017 ketika narasi sekuritisasi marak dibawakan oleh partai AfD, CSU, dan gerakan anti-Islam PEGIDA. Jumlah pengungsi yang signifikan tanpa dibarengi dengan kapabilitas negara menjadi

alasan lain pergeseran cara pandang Jerman. Hal ini tentu menimbulkan permasalahan baru, seperti kriminalitas dan beban anggaran belanja negara untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi (pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan). Jerman kemudian menerapkan kebijakan *masterplan migration, Asylum Package I & II,* dan Undang-Undang Pemulangan Tertib (*Geordnete-Rückkehr-Gesetz*) tahun 2019. Dampak dari proses sekuritisasi ini membuat standar perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Jerman menjadi lebih fleksibel demi kepentingan keamanan nasional. Sekuritisasi pengungsi juga telah menciptakan polarisasi dalam masyarakat Jerman karena di awal pengungsi dipandang dari segi kemanusiaan atau sebagai 'korban'. Selain itu, narasi sekuritisasi di dua negara telah membentuk diskursus anti-pengungsi atau secara umum anti-migran. Saran yang hendak peneliti usulkan kepada peneliti selanjutnya yaitu dapat mengkaji lebih lanjut perubahan kebijakan Jerman terhadap pengungsi dan kebijakan pengungsi Inggris setelah keluar dari Uni Eropa.

DAFTAR PUSTAKA

ABCNews. (2025). *Thousands of Migrants Attempt Dangerous Crossing to UK in Small Boats*. https://youtu.be/eXYeDD5dUQQ?si=AcOY4E9AssukcwCn

Abdi, M. (2025). *Ein Mangel an Freiheit, ein Mangel an Würde*. Taz.De. https://taz.de/Tagebuch-von-der-Refugee-Karawane-/!6115911/

AIDA. (2018). Country Report : Germany. In *Asylum Information Database*. https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2019/04/report-download_aida_de_2018update.pdf

AlJazeera. (2015). *Merkel Says Refugee Crisis Tests Europe's Core Ideals*. Aljazeera.Com. https://www.aljazeera.com/news/2015/8/31/merkel-says-refugee-crisis-tests-europes-core-ideals

Alkousaa, R. (2025). *Germany's Struggle to House Refugee Fuels Election Debate*. Reuters.Com. https://www.reuters.com/world/europe/germanys-struggle-house-refugees-fuels-election-debate-2025-02-12/

Ataç, E. (2019). *The Populist Radical Right in Germany Ideology & Policies of Alternative für Deutschland (AfD)*. Economic Development Foundation (IKV).

BBC. (2017). *Germany Hate Crime: Nearly 10 Attacks a Day on Migrants in 2016*. Bbc.Com. https://www.bbc.com/news/world-europe-39096833

BMI. (2021). *Number of First-Time Asylum Applications Dropped Significantly in 2020*. Federal Ministry of the Interior. https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/EN/2021/01/asylzahlen-jahr-2020-en.html#:~:text=Additional asylum statistics for 2020,4 of the Asylum Act.

Braverman, S. (2023). *Home Secretary Statement on The Illegal Immigration Bill*. GOV.UK. https://www.gov.uk/government/speeches/home-secretary-statement-on-the-illegal-immigration-bill

Bundesministerium des Innern. (2019). *Geordnete-Rückkehr-Gesetz tritt heute in Kraft*. https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2019/08/geg-geordnete-rueckkehr-gesetz.html

Bundesministerium des Innern, für B. und H. (2018). *Masterplan Migration: Maßnahmen zur Ordnung, Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung*. https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/migration/masterplan-migration.pdf?__blob=publicationFile&v=7

Buzan, B., Waever, O., & Wilde, J. de. (1998). Security: A New Framework for Analysis. In *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau* (Vol. 16, Issue 2). Lynne Rienner Publishers, Inc.

Cameron, D. (2015a). *European Council June 2015: David Cameron's Speech*. GOV.UK. https://www.gov.uk/government/speeches/european-council-june-2015-david-camerons-speech

Cameron, D. (2015b). *PM Speech on Immigration*. GOV.UK.

https://www.gov.uk/government/speeches/pm-speech-on-immigration

CDU. (2025). *Policy Change for Germany: CDU CSU Election Programme*. https://www.cdu.de/app/uploads/2025/01/wahlprogramm-cdu-csu-kurzfassung-englisch.pdf

Cooper, G., & Blumell, L. (2021). Beyond the 'refugee crisis': How the UK News Media Represent Asylum Seekers Across National Boundaries. *International Communication Gazette*, *83*(3), 195–216. https://doi.org/10.1177/1748048520913230

Creswell, J. W., & Creswell, J, D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Fifth Edit). SAGE Publications, Inc.

Dasep, M. (2024). Angela Merkel's Leadership in Germany's Open Door Policy on Handling the Refugee Crisis in Europe. *Journal of Global Strategic Studies*, *04*(01). https://doi.org/10.36859/jgss.v4i1.2135

Decarli, J. M. (2022). 2015 Syrian Refugee Responses Based on the Strength of Securitization Discourse. *Claremont-UC Undergraduate Research Conference on the European Union*, *2022*. https://doi.org/10.5642/urceu.XMDB6145

Deutsches Institut für Menschenrechte. (2019). *Vertiefte Diskussion des Geordnete-Rückkehr-Gesetzes erforderlich*. Deutsches Institut Für Menschenrechte. https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/aktuelles/detail/vertiefte-diskussion-des-geordnete-rueckkehr-gesetzes-erforderlich

Diez, T., & Squire, V. (2008). Traditions of Citizenship and the Securitisation of Migration in Germany and Britain. *Taylor & Francis*, *12*, 565–581. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/13621020802450643

Dinnen, C. (2015). *PM Likely to Hear His "Swarm" Comment again and again*. Itv.Com.

Dowling, S. (2019). *Germany Welcomed Refugees. Now it's Reaping the Economic Benefits*. Www.Aljazeera.Com. https://www.aljazeera.com/economy/2019/6/20/germany-welcomed-refugees-now-its-reaping-the-economic-benefits

EUAA. (2025). *Latest Asylum Trends: January-June 2025*. Europan Union Agency for Asylum. https://euaa.europa.eu/latest-asylum-trends-mid-year-review-2025/applications#:~:text=Applications lodged Jan – Jun 2025&text=In the first half of 2025%2C Germany was no longer,seen in the Overview section.

Eurogendfor. (2025). *French Gendarmerie Nationale, Member State*. Eurogendfor: European Gendarmerie Force. https://eurogendfor.org/gendarmerie-nationale-francaise-full-member/

European Parlement. (2020). *Dublin Regulation on International Protection Applications* (A. Scherrer (ed.)). European Parliamentary Research Service. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/642813/EPRS_STU(2020)642813_EN.pdf

European Parlement. (2025). *EU-Turkey Statement & Action Plan*. Legislative Train Schedule. https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-eu-turkey-statement-action-plan

Flüchtlingsrat Mecklenburg-Vorpommern e.V. (2016). *Asylum Package II, What Does it Mean for Refugees and Their Supporters?* https://www.fluechtlingsrat-mv.de/wp-content/uploads/2016/04/Information_Asylpaket-2_englisch.pdf

FRA. (2016). Monthly Data Collection on the Migration Situation in the EU October 2016 Monthly Report. *European Union Agency for Funcamental Rights*, *September*, 1–66. https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-october-2016-monthly-migration-report_en_0.pdf

Gibney, M. J., & Hansen, R. (2003). Deportation and The Liberal State: The Forcible Return of Asylum Seekers and Unlawful Migrants in Canada , Germany and the United Kingdom. *New Issues in Refugee Research*, *77*, 1–19. https://www.unhcr.org

Global Justice Now. (2018). The Hostile Environment for Immigrants How Theresa May Has Created. *Global Justice Now*. https://www.globaljustice.org.uk/wp-content/uploads/2018/03/hostile_environment_briefing_feb_2018_web.pdf

Gómez, J.-P. C. (2019). *The Securitization of Asylum an Analysis of the Impact of the 2015-2016*

Refugee Asylum Policies in Germany. Global Migration Centre (GMC).

Goodier, M. (2025). *What Do the Immigration Figures for the UK really Show?* The Guardian. https://www.theguardian.com/uk-news/2025/sep/14/what-do-the-immigration-figures-for-the-uk-really-show

Gower, M. (2025). *Unauthorised Migration: Timeline and Overview of UK-France Cooperation*. https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-9681/CBP-9681.pdf

Griffiths, M., & Yeo, C. (2025). The UK's Hostile Environment: Deputising Immigration Control The UK ' s Hostile Environment: Deputising Immigration Control. *University of Brimingham*. https://doi.org/10.1177/0261018320980653

Haliza, F. T., & Pujiyono, B. (2019). Kebijakan Open Door Policy Oleh Angela Merkel dalam Kerangka Common European Asylum System (CEAS). *JOM*.

Hamilton, W. L., Cook, J. T., Thompson, W. W., Buron, L. F., & ... (1997). *Household food security in the United States in 1995: technical report of the food security measurement project*. ageconsearch.umn.edu. https://ageconsearch.umn.edu/record/344955/

Harding, L. (2016). *Pegida Leader Criticised for Linking Munich Terror Plot to Refugee Intake*. The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2016/jan/01/pegida-leader-lutz-bachmann-linking-munich-terror-plot-with-refugee-intake

Hentze, T., & Kolev, G. V. (2016). Gesamtwirtschaftliche Effekte der Flüchtlingsmigration in Deutschland. *IW-Trends – Vierteljahresschrift Zur Empirischen Wirtschaftsforschung*, *43*(4), 59–76. https://econpapers.repec.org/RePEc:zbw:iwktre:157643

Hoffmeyer-Zlotnik, P. (2021). *Country Report : Germany*. https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2022/04/AIDA-DE_2021update.pdf

ITV News. (2015). *PM Blames Calais Crisis on "Swarm" of Migrants*. Itv.Com. https://www.itv.com/news/update/2015-07-30/pm-a-swarm-of-migrants-want-to-come-to-britain/

Joppke, C. (1999). *Immigration and The Nation-State*. Oxford University Press.

Kalkmann, M. (2015). *Country Report: Germany*. https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2015/11/report-download_aida_de_update.iv__0.pdf

Kalkmann, M. (2016). *Country Report: Germany*. http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report-download/aida_de_2016update.pdf

Kalkmann, M. (2017). *Country Report: Germany*. https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2018/03/report-download_aida_de_2017update.pdf

Kalkmann, M., & Hesari, D. K. (2019). Country report: Germany. In *Asylum Information Database*. https://doi.org/10.4337/9781788115926.00022

Kelsall, H. (2015). Empathy Legality Politics and Protection: Framing Refugees and Asylum Seekers in the UK Press. *Erasmus University Rotterdam*.

Kinkartz, S. (2023). *Germany Struggles to House Refugees*. DW. https://www.dw.com/en/germany-struggles-to-house-refugees/a-66332089

Kirk-wade, E., & Barton, C. (2025). Asylum Statistics. *The House of Commons Library*, *35*(149), 148–148. https://doi.org/10.1192/bjp.35.149.148

Kok, T. H. (2021). Migration Attitudes in Germany and the UK in Times of Change: A Quantitative Study Comparing Attitudes toward Migration in 2002 and 2016 [University of Gothenburg]. In *Department of Political Science Centre for European Studies (CES)*. https://gupea.ub.gu.se/bitstream/handle/2077/68221/gupea_2077_68221_1.pdf?sequence=1

Kushner, J. (2017). *Dresden's Welcome Cafes for Refugees*. Www.Aljazeera.Com. https://www.aljazeera.com/features/2017/7/27/dresdens-welcome-cafes-for-refugees

Lindvall, A. (2016). Have Refugees Become A Security Problem? A comparative Study of securitization in the United Kingdom and Germany. *University of Gotenburgh*, 41. https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/42428/1/gupea_2077_42428_1.pdf

Liu, Y., & Yin, S. (2021). The Adjustment, Consequences and Challenges of German Refugee Policy. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, *571*(Isemss), 891–896.

MEMO. (2015). *EU-Turkey Joint Action Plan*. European Commission. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/memo_15_5860/MEMO_15_5860_EN.pdf

Migration Watch UK. (2024). *Is Immigration a Threat to UK Security?* Migrationwatchuk.Org. https://www.migrationwatchuk.org/briefing-paper/520/is-immigration-a-threat-to-uk-security

Mouzourakis, M., Pollet, K., & Ott, J.-D. (2019). The AnkER Centres: Implications for Asylum Procedures, Reception and Return. *European Council on Refugee and Exiles Asylum Information Database*. https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2020/11/anker_centres_report.pdf

Mustaq, S., Hamid, D., & Shaikh, A. (2021). Securitisation of the Refugee Issue in Germany: The Far Right Challenge to Government Policies. *Malaysian Journal of International Relations*, *9*, 1–21. https://ejournal.um.edu.my/index.php/mjir/article/view/25375/14081

NATO. (n.d.). *French Gendarmerie*. NATO Stability Policing. Retrieved November 15, 1 B.C.E., from https://www.nspcoe.org/about-us/sponsoring-nations/french-republic/french-gendarmerie/

Niu, Z., Song, W., Lu, Y., & Bao, X. (2023). Merkel Government ’s Refugee Policy: Under Bounded Rationality. *Social Sciences*, *12*(187), 2–24. https://doi.org/https://doi.org/10.3390/socsci12030187

Nurtyandini, R. T., & Santoso, M. P. T. (2022). The Impact Of The Brexit Referendum On European Union Immigrant Policy In The UK. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, *2*, 44–48. https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/lino/article/view/1459/786

Oxford Economics. (2018). *The Fiscal Impact of Immigration on The UK: A Report for the Migration Advisory Committee*. *June*.

Özoguz. (2015). *Deutscher Bundestag: Mediathek - Özoguz, Aydan, Staatsministerin für Migration, Flüchtlinge und Integration*. Deutscher Bundestag. https://doi.org/http://dbtg.tv/fvid/5890688

Perez, C. S. (2023). The Securitization of Asylum: A Review of UK Asylum Laws Post-Brexit. *International Journal of Refugee Law*, *35*(3), 304–321. https://doi.org/10.1093/ijrl/eead030

phoenix. (2015). *G7-Dialogforum: Rede von Angela Merkel zur Flüchtlingskatastrophe am 20.04.2015*. YouTube. https://doi.org/https://youtu.be/nkxZnOeRtWw?si=5xv706Mbx9iEYh2p

Pierce, P., Adil, H., Kwok, T., Cooke, C., Bazinet, D., Roll, K., & Hillman, S. L. (2025). Effects of UK Hostile Environment Policies on Maternity Care for Refugees, Asylum Seekers , and Undocumented Migrants in Camden : Examining the Experiences of Healthcare Professionals and Community Organisations. *Journal of Migration and Health*, *11*(March 2024), 100291. https://doi.org/10.1016/j.jmh.2024.100291

PRO ASYL. (n.d.). *Standing up for Refugee Protection*. Proasyl.De. Retrieved February 4, 2026, from https://www.proasyl.de/en/standing-up-for-refugee-protection/

PRO ASYL. (2019). *Das »Geordnete-Rückkehr-Gesetz« ignoriert rechtsstaatliche Grundsätze*. PRO ASYL. https://www.proasyl.de/news/das-geordnete-rueckkehr-gesetz-ignoriert-rechtsstaatliche-grundsaetze/

Putra, I. D. G. P. P., Susanti, S., & Dewi, P. R. K. (2016). Dampak Referendum Brexit Terhadap Kebijakan Imigran Uni Eropa di Inggris. *Penelitian*, 1–12.

Radu, A. G. (2018). 2018 British Media Representations of Refugees: The case of The Guardian. *Jonkoping University*.

Richards, L., Raino, M. F., & Blinder, S. (2025). UK Public Opinion toward Immigration : Overall Attitudes and Level of Concern. *Centre on Migration, Policy & Society (COMPAS)*, 1–16. http://www.migrationobservatory.ox.ac.uk/

Riemer, L., Rau, L., & Schalast, R. (2024). *Country Report: Germany*. https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2025/06/AIDA-DE_2024-Update.pdf

Rowsome, A. (2018). *From Periods to Pregnancy- The Sexual Health Crisis for Calais Refugee*.

The Guardian. https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2018/feb/26/periods-to-pregnancy-sexual-health-crisis-calais-refugees-volunteers-gynaecology-without-borders

Sahin-Mencutek, Z., Barthoma, S., Gökalp-Aras, N. E., & Triandafyllidou, A. (2022). A Crisis Mode in Migration Governance: Comparative and Analytical Insights. *Comparative Migration Studies*, *10*(1). https://doi.org/10.1186/s40878-022-00284-2

Setiabudi, C. S. (2021). Pengaruh Kebijakan Pengungsi Uni Eropa Terhadap Perkembangan Gerakan Eurosceptic Di Eropa. *Wanua : Jurnal Hubungan Internasional Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin*, *6*(1), 81. http://www.tandfonline.com

Shah, M. M. S. (2024). *Understanding Barry Buzan's Securitization Theory*. *February*. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.18293.55526

Siddiqui, R. H. (2024). A Comparative Analysis of Immigration Laws: Case Studies of the Canada, Germany, the United States of America (USA) and the United Kingdom (UK). *International Journal of Law Analytics*, *2*(2), 115–132. https://doi.org/10.59890/ijla.v2i2.1743

Steffy. (2023). *Implementasi Kebijakan Angela Merkel terhadap Gelombang Pengungsi Timur Tengah*. *14*(1), 32–46. https://doi.org/10.31479/jualter.v14i1.55

Stewart, H., & Mason, R. (2016). *Nigel Farage's anti-Migrant Poster Reported to Police*. The Guardian. https://www.theguardian.com/politics/2016/jun/16/nigel-farage-defends-ukip-breaking-point-poster-queue-of-migrants

Stiller, M., & Hoffmeyer-Zlotnik, P. (2022). *Country Report : Germany*. https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2023/04/AIDA-DE_2022update.pdf

Strickland, P. (2016). *The Rise of Germany's anti-Refugee Right*. Aljazeera.Com. https://www.aljazeera.com/features/2016/4/7/the-rise-of-germanys-anti-refugee-right

Terre des Hommes. (2024). *Stories Shape Societies* (Www.emilysadler.com (ed.)). PositiveComms.co.uk. https://terredeshommes.org/wp-content/uploads/2024/10/TDH-hope-based-comms-guidelines-8-web.pdf

Trines, S. (2019). *The State of Refugee Integration in Germany in 2019*. World Education News + Review. https://wenr.wes.org/2019/08/the-state-of-refugee-integration-in-germany-in-2019

UK Parliament. (n.d.). *MPs to Question Border Security Commander on Tackling Small Boat Crossings*. Committes Parliament UK2025. Retrieved November 15, 2025, from https://committees.parliament.uk/committee/83/home-affairs-committee/news/209585/mps-to-question-border-security-commander-on-tackling-small-boat-crossings/

UNHCR. (2008). *The Dublin Regulation for Determining the Member State Responsible for Examining an Asylum Application Lodged in One*. https://www.unhcr.org/media/dublin-regulation

Uranga, A. (2021). Securitizing Immigrants: Applying Securitization Theory in German Politics. *Pathways*, *1*(3), 1–14. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:244637967

Venkataramakrishnan, S. (2025). *"Total remigration": Anti-Migrant Narratives Targeting the UK*. Institute for Strategic Dialogue. https://www.isdglobal.org/digital-dispatch/total-remigration-anti-migrant-narratives-targeting-the-uk/

Virdee, S., & Mcgeever, B. (2018). Racism, Crisis, Brexit. *Ethnic and Racial Studies*, *9870*(10). https://doi.org/10.1080/01419870.2017.1361544

Warmbein, A., Beiersmann, C., Eulgem, A., Demir, J., & Neuhann, F. (2023). Challenges in Health Care Services for Refugees in Cologne, Germany: A Providers' Perspective using a Mixed-Methods Approach. *Journal of Migration and Health*, *7*. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jmh.2023.100158

Weis, P. (1999). The Refugee Convention, 1951. *Verfassung in Recht Und Übersee*, *32*(3), 397–398. https://doi.org/10.5771/0506-7286-1999-3-397

Yaseen, M., Ghayoor, S., Hassan, M. S., Jabeen, F., & Shakir, M. ul H. (2025). The Political Dynamics of Refugee Migration in Europe: Analyzing the Impact of Nationalism, EU Solidarity, and the Dublin Regulation Post-2015 Migrant Crisis. *The Critical Review of*

Social Sciences Studies, *3*(1), 486–510. https://doi.org/10.59075/ma4tcx41

Yeni, M. F. (2019). Motivasi Jerman dalam Menerima Pengungsi Asal Suriah Pada Tahun 2015. *Frequency of International Relations*, *1*(1), 158–201.

Zusammenfassung. (2021). *Länderbericht : Deutschland 2021*. https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2022/04/AIDA-DE_2021update_summary.pdf